

Penguatan Kapasitas *Community Based Tourism* (CBT) melalui Pendekatan *Social Ecological* di Desa Wisata Taro, Bali

Strengthening Community Based Tourism (CBT) Capacity through a Social Ecological Systems Approach in Taro Tourism Village, Bali

**Ni Luh Putu Widya Astuti^{1*}, Ni Putu Bintang Pertiwi Winarsa², Nadine Abigail Gracia Sitohang³,
Ni Made Sofia Wijaya⁴**

Universitas Udayana

***Email Correspondence:** putuwidyaas@gmail.com

Abstract

The development of Community Based Tourism (CBT) in tourism villages depends not only on community participation and tourism business growth but also on institutional capacity and the ability to maintain local resources. Although research on CBT and tourism sustainability has expanded, the relationship between community capacity and social-ecological dynamics in tourism village management requires further examination, particularly in Taro Tourism Village, Bali. This study adopts a qualitative case study approach, using interviews, field observations, and document analysis to examine CBT management through the Social-Ecological Systems (SES) perspective. The findings indicate that Taro has established a foundation for tourism management through local institutions, community-based businesses, and coordination among stakeholders. However, these foundations are not yet fully supported by adequate human resource readiness, substantive community participation, and consistent resource maintenance. These conditions suggest that community capacity should be understood not merely as individual skills or the ability to develop businesses, but also as a collective capacity to participate in decision-making, implement management practices, and maintain social-ecological resources. Strengthening CBT in Taro therefore requires improvements in community competencies, transparency in economic benefit distribution, and governance that integrates social, cultural, and environmental interests.

Keywords: *Community Based Tourism; Social-Ecological Systems; community capacity; tourism village; tourism sustainability.*

Abstrak

Pengembangan *Community Based Tourism* (CBT) di desa wisata tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat dan pertumbuhan usaha pariwisata, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan serta kemampuan menjaga sumber daya lokal. Kajian mengenai CBT dan keberlanjutan pariwisata telah berkembang, tetapi keterkaitan antara kapasitas masyarakat dan dinamika sistem sosial-ekologis dalam pengelolaan desa wisata masih memerlukan pendalaman, khususnya dalam konteks Desa Wisata Taro, Bali. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi untuk memahami pengelolaan CBT melalui perspektif *Social-Ecological Systems* (SES). Temuan memperlihatkan bahwa Taro memiliki fondasi pengelolaan berupa kelembagaan lokal, pengembangan usaha masyarakat, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Namun, fondasi tersebut belum sepenuhnya diikuti kesiapan sumber daya manusia, partisipasi substantif, dan konsistensi pemeliharaan sumber daya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kapasitas masyarakat tidak cukup dipahami sebagai keterampilan individu atau kemampuan mengembangkan usaha, tetapi juga mencakup kemampuan kolektif dalam mengambil keputusan, menjalankan pengelolaan, dan menjaga sumber daya sosial-ekologis. Penguatan CBT di Taro perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi masyarakat, transparansi manfaat ekonomi, serta tata kelola yang mengintegrasikan kepentingan sosial, budaya, dan lingkungan.

Kata kunci: *Community Based Tourism; Social Ecological Systems; kapasitas masyarakat; desa wisata; keberlanjutan pariwisata.*

PENDAHULUAN

Bali memiliki potensi pariwisata yang bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, budaya, dan kehidupan masyarakat lokal di kawasan perdesaan. Pengembangan desa wisata menjadi salah satu strategi untuk mengintegrasikan potensi tersebut ke dalam kegiatan pariwisata sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan destinasi. Studi Rosalina et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata perdesaan di Bali memerlukan keterlibatan masyarakat dan desa adat untuk mempertahankan kendali lokal atas sumber daya, mendukung pengelolaan infrastruktur dan tenaga kerja, serta mendorong konservasi melalui pengembangan pengalaman wisata. *Community Based Tourism* (CBT) menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta distribusi manfaat pariwisata. Namun, pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat tidak hanya berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga dengan bagaimana aktivitas pariwisata dikelola agar tetap selaras dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan setempat. Hafezi et al. (2023) menjelaskan bahwa keberlanjutan ekowisata berbasis masyarakat perlu memperhatikan dimensi pengelolaan, sosial-ekonomi, budaya, serta lingkungan secara terpadu dan pengembangan CBT memerlukan pendekatan yang mampu menjelaskan keterkaitan antara masyarakat sebagai pelaku utama dan sumber daya yang menopang keberlangsungan kegiatan pariwisata.

Pentingnya pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan semakin terlihat seiring dengan perkembangan pariwisata di Bali. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2026) mencatat sebanyak 6.948.754 kunjungan wisatawan mancanegara secara langsung sepanjang Januari–Desember 2025, meningkat 9,72% dibandingkan tahun 2024. Sementara itu, data Jaringan Desa Wisata (JADESTA) Kementerian Pariwisata per Oktober 2026 mencatat terdapat 6.396 desa wisata di Indonesia, termasuk 168 desa wisata di Provinsi Bali. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin pentingnya desa wisata dalam diversifikasi destinasi pariwisata. Akan tetapi, pengembangan pariwisata tidak cukup diukur melalui pertumbuhan kunjungan dan bertambahnya produk wisata. Pengelolaan destinasi juga perlu memperhatikan ketersediaan sumber daya, kapasitas pengelola, kondisi lingkungan, dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan kegiatan pariwisata berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan CBT perlu dipahami sebagai proses yang melibatkan hubungan dinamis antara sistem sosial dan sistem ekologis.

Pendekatan *Social Ecological Systems* (SES) dapat digunakan untuk memahami keterkaitan antara masyarakat dan lingkungan dalam pengelolaan pariwisata. perspektif ini memandang sistem masyarakat dan lingkungan sebagai komponen yang saling berinteraksi, sehingga keberlanjutan destinasi perlu dipahami melalui hubungan antara aktivitas manusia dan kondisi sumber daya yang saling mendukung wisata. Adrianto et al. (2021), melalui penelitian di Kepulauan Tidung, Indonesia, menerapkan model *Social Ecological System Carrying Capacity* dengan mengintegrasikan daya dukung sosial dan ekologis untuk mendukung pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan persepsi sosial dan kapasitas fisik lingkungan dalam menentukan daya dukung aktivitas wisata. Sementara itu, (Hanita et al. (2024) mengkaji ketahanan pariwisata di Bali dengan menyoroti peran komunitas budaya, hubungan antarpemangku kepentingan, serta interaksi sosial-ekologis dalam proses pemulihan pariwisata. Kedua penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami bahwa pengelolaan

destinasi perlu mempertimbangkan hubungan antara masyarakat, tata kelola, aktivitas pariwisata, dan lingkungan. Dalam konteks pengelolaan *Community Based Tourism* (CBT), perspektif SES dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kapasitas masyarakat dan kelembagaan berhubungan dengan pemanfaatan serta pemeliharaan sumber daya lokal. Dalam konteks pariwisata perdesaan di Bali, keterkaitan antara sistem sosial dan ekologis tercermin dalam pengelolaan sumber daya lokal. Rosalina et al. (2023), melalui studi terhadap dua desa wisata di Bali, menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dan desa adat dalam mempertahankan kendali lokal atas sumber daya, mengelola infrastruktur dan tenaga kerja, serta mendukung konservasi melalui pengembangan pengalaman wisata dan *storytelling*. Temuan tersebut juga menyoroti pentingnya hubungan antara spiritualitas, masyarakat, dan alam dalam pengelolaan sumber daya pariwisata. Sejalan dengan itu, Rosalina et al. (2025) menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya pariwisata perdesaan memerlukan tahapan perencanaan, pengaturan, dan implementasi yang mempertimbangkan karakteristik sumber daya serta potensi konflik pemanfaatannya. Kedua penelitian tersebut memberikan dasar untuk memahami pengelolaan pariwisata sebagai proses yang melibatkan interaksi antara masyarakat, kelembagaan, dan sumber daya lokal.

Desa Wisata Taro, Bali, merupakan lokasi yang relevan untuk mengkaji pengelolaan *Community Based Tourism* (CBT) melalui pendekatan SES karena pengembangan pariwisatanya melibatkan sumber daya alam, budaya, spiritualitas, serta berbagai kelembagaan lokal. Wirawan, (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan spiritual yang berlandaskan Tri Hita Karana menjadi bagian dari praktik pengelolaan pariwisata di Taro, termasuk hubungan antara manusia dan alam. Dari sisi kelembagaan, Bagus et al (2023) mengkaji strategi komunikasi BUMDes Sarwada Amertha dalam mengelola Desa Wisata Taro, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan promosi. Sementara itu, Kalpikawati et al (2023) memperlihatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta peran desa adat dalam mendukung pengelolaan lingkungan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata Taro melibatkan hubungan antara praktik sosial budaya, kelembagaan, kegiatan ekonomi, dan pemeliharaan lingkungan. Berdasarkan konteks tersebut, pendekatan SES digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara kapasitas masyarakat, tata kelola kelembagaan, aktivitas pariwisata, dan sumber daya lokal dalam pengelolaan CBT di Desa Wisata Taro.

Perkembangan pariwisata di Desa Taro berlangsung melalui proses identifikasi potensi dan pengembangan berbagai produk wisata. Pada tahun 2017, dibentuk Pokdarwis sebagai salah satu kelompok yang berperan dalam koordinasi pengembangan pariwisata selanjutnya, pada tahun 2018, dilaksanakan proyek percontohan pengembangan desa wisata yang mencakup potensi Lembu Putih di Taro Kaja, Semara Ratih di Taro Kelod, serta Bali Wana di Pakuseba yang memiliki kawasan hutan dan keberadaan kera. Berbagai potensi tersebut kemudian dikembangkan melalui paket wisata, bersepeda (*cycling*), *outbound*, kegiatan edukasi, dan pengalaman berbasis kehidupan masyarakat. Perkembangan produk wisata turut mendorong kebutuhan terhadap akomodasi dan jasa pendukung pariwisata. Pada tahun 2019, salah satu *homestay* awal di Taro dikembangkan oleh Ketua Pokdarwis dan kemudian menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk membangun usaha serupa yang dimana proses ini memperlihatkan keterkaitan antara inisiatif individu, pembelajaran masyarakat, pengembangan usaha, dan kelembagaan desa wisata. Dalam perspektif SES, dinamika

tersebut dapat dipahami sebagai interaksi antara aktor sosial, struktur kelembagaan, aktivitas ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya lokal yang mendukung kegiatan pariwisata.

Meskipun pengembangan CBT di Taro telah melibatkan masyarakat dan berbagai kelembagaan lokal, pengelolaannya tetap berlangsung dalam kondisi yang dinamis. Berdasarkan wawancara dengan pengelola dan pelaku usaha pariwisata, kesiapan sumber daya manusia masih menjadi salah satu tantangan, sementara keterlibatan generasi muda menghadapi kendala karena sebagian memilih bekerja di luar desa untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, pengelolaan daya tarik wisata memerlukan perhatian terhadap pemeliharaan fasilitas, penyampaian informasi mengenai sejarah dan nilai budaya, serta koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kapasitas individu, tetapi juga dengan hubungan antara masyarakat, kelembagaan pengelola, kebutuhan operasional pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya lokal dalam pendekatan SES, persoalan-persoalan tersebut perlu dianalisis secara saling berkaitan agar pengelolaan CBT tidak hanya dinilai berdasarkan partisipasi masyarakat atau pertumbuhan kegiatan wisata, tetapi juga berdasarkan hubungan antara tata kelola sosial dan keberlanjutan sumber daya yang menopang destinasi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata berkelanjutan berkaitan dengan interaksi antara masyarakat, kelembagaan, dan sumber daya lokal. Rosalina et al. (2023) menyoroti peran masyarakat dan desa adat dalam pengelolaan sumber daya pariwisata di Bali, sedangkan Hanita et al. (2024) membahas peran komunitas budaya dalam memperkuat ketahanan pariwisata. Adrianto et al. (2021) menunjukkan relevansi pendekatan *Social Ecological Systems* (SES) dalam menganalisis daya dukung sosial dan ekologis destinasi, sementara Hafezi et al. (2023) menekankan integrasi aspek sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan dalam ekowisata berbasis masyarakat. Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini menganalisis penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Taro, Bali, melalui pendekatan SES dengan berfokus pada keterkaitan aktor, kelembagaan, aktivitas pariwisata, dan sumber daya lokal. Penelitian ini memusatkan perhatian pada penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan CBT melalui perspektif SES, dengan menelaah keterkaitan antara aktor lokal, kelembagaan, aktivitas pariwisata, serta pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya lokal. Perspektif ini digunakan untuk memahami bagaimana interaksi antara komponen sosial dan ekologis memengaruhi proses pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Taro, Bali.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Community-Based Tourism (CBT)*

CommunityBased Tourism (CBT) merupakan pendekatan pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor penting dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan destinasi. Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja atau penyedia produk wisata, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan arah pengembangan pariwisata, membangun kerja sama, dan mengelola sumber daya lokal. Dengan demikian, keberhasilan CBT tidak hanya dilihat dari perkembangan kegiatan ekonomi pariwisata, tetapi juga dari keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan destinasi. Okazaki (2008) mengembangkan model CBT yang mengintegrasikan partisipasi masyarakat, redistribusi

kekuasaan, proses kolaborasi, dan modal sosial (*social capital*). Model ini memberikan landasan untuk memahami bahwa pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat memerlukan keterlibatan yang bermakna serta hubungan kolaboratif antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat tidak cukup dipahami sebagai keikutsertaan dalam kegiatan wisata, tetapi juga perlu dilihat melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan kemampuan masyarakat untuk memengaruhi proses pengelolaan. Selain itu, kolaborasi dan modal sosial berperan dalam membangun hubungan, kepercayaan, serta tindakan kolektif yang mendukung pengelolaan destinasi.

Prinsip CBT berkaitan dengan kemampuan masyarakat dan kelembagaan lokal untuk mengorganisasi kegiatan pariwisata, mengembangkan produk wisata, serta menjaga sumber daya yang menjadi dasar pengembangan destinasi. Rosalina et al. (2023), melalui penelitian mengenai strategi pengelolaan sumber daya pariwisata di dua desa wisata di Bali, menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dan desa adat dalam pengelolaan sumber daya, infrastruktur, tenaga kerja, dan pengalaman wisata. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan desa wisata membutuhkan keterlibatan aktor lokal serta kemampuan kelembagaan untuk menghubungkan kepentingan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya pariwisata. Berdasarkan model Okazaki (2008), penelitian ini menggunakan CBT sebagai landasan untuk menganalisis kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Taro, Bali. Fokus analisis diarahkan pada partisipasi masyarakat, kolaborasi antarpemangku kepentingan, dan peran modal sosial dalam mendukung pengelolaan wisata. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pengelolaan serta bagaimana hubungan sosial dan kelembagaan dapat mendukung pengembangan destinasi. Aspek-aspek tersebut selanjutnya dikaji bersama pendekatan Social-Ecological Systems (SES) agar pengelolaan CBT dapat dipahami dalam keterkaitannya dengan aktivitas pariwisata dan sumber daya lokal.

2. *Social Ecological Systems (SES)*

Social Ecological Systems (SES) merupakan kerangka analisis yang digunakan untuk memahami hubungan timbal balik antara sistem sosial dan sistem ekologis. Sistem sosial mencakup aktor, kelembagaan, aturan, dan aktivitas manusia, sedangkan sistem ekologis berkaitan dengan sumber daya alam serta kondisi lingkungan yang mendukung keberlangsungan aktivitas tersebut. Kedua sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi melalui berbagai bentuk interaksi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia, tata kelola kelembagaan, pemanfaatan sumber daya, dan kondisi lingkungan. Ostrom (2009) mengembangkan kerangka umum untuk menganalisis keberlanjutan sistem sosial-ekologis dengan menekankan hubungan antara berbagai komponen sistem, interaksi antarpelaku, serta kemampuan pengguna sumber daya untuk mengorganisasi diri. Kerangka ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh karakteristik aktor, aturan yang berlaku, dan proses interaksi yang membentuk pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, kapasitas masyarakat dan kelembagaan menjadi bagian penting untuk memahami bagaimana suatu sistem dapat dikelola serta dipertahankan dalam menghadapi perubahan.

Dalam bidang pariwisata, pendekatan SES dapat digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara masyarakat lokal, kelembagaan pengelola, aktivitas ekonomi pariwisata, dan sumber daya

alam maupun budaya yang dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Adrianto et al. (2021), melalui penelitian mengenai daya dukung sosial-ekologis pariwisata di Kepulauan Tidung, menunjukkan relevansi integrasi aspek sosial dan ekologis dalam analisis pengelolaan destinasi. Kajian tersebut menegaskan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial dan kapasitas lingkungan ketika menilai keberlanjutan aktivitas pariwisata. Sementara itu, Hanita et al. (2024) mengkaji peran komunitas budaya dalam memperkuat ketahanan pariwisata di Bali, dengan perhatian pada hubungan sosial dan keterlibatan pemangku kepentingan. Kedua penelitian tersebut memberikan konteks bahwa keberlanjutan pariwisata berkaitan dengan kondisi sumber daya dan hubungan antarpelaku yang terlibat dalam pengelolaannya dalam penelitian ini, SES digunakan sebagai kerangka analitis untuk memahami pengelolaan CBT di Desa Wisata Taro sebagai suatu sistem yang melibatkan masyarakat, kelembagaan lokal, kegiatan pariwisata, serta sumber daya alam dan budaya. Kerangka ini membantu menganalisis bagaimana kapasitas masyarakat dan hubungan antarlembaga berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan, serta pemeliharaan sumber daya lokal. SES melengkapi perspektif CBT digunakan untuk memahami partisipasi dan proses pengelolaan berbasis masyarakat, sedangkan SES membantu menjelaskan keterkaitan antara proses tersebut dan sistem sosial-ekologis yang menopang keberlangsungan destinasi.

Penelitian terdahulu memberikan landasan untuk memahami pengelolaan desa wisata melalui perspektif partisipasi masyarakat, kelembagaan, dan keberlanjutan sumber daya. Okazaki (2008) menawarkan model untuk menganalisis partisipasi, kolaborasi, redistribusi kekuasaan, dan modal sosial dalam CBT. Rosalina et al. (2023) membahas keterlibatan masyarakat dan desa adat dalam pengelolaan sumber daya pariwisata di Bali, sedangkan Hanita et al. (2024) menyoroti peran komunitas budaya dalam membangun ketahanan pariwisata. Di sisi lain, Adrianto et al. (2021) memperlihatkan relevansi analisis sosial-ekologis dalam pengelolaan destinasi melalui kajian daya dukung sosial dan lingkungan. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga melibatkan hubungan sosial, tata kelola kelembagaan, dan kondisi sumber daya.

Meskipun memberikan landasan yang relevan, penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda, mulai dari model CBT, strategi pengelolaan sumber daya desa wisata, ketahanan komunitas budaya, hingga daya dukung sosial-ekologis. Penelitian ini memadukan perspektif CBT dan SES untuk menganalisis penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Taro, fokus tersebut diarahkan pada keterkaitan antara partisipasi masyarakat, kolaborasi antarpemangku kepentingan, peran kelembagaan lokal, aktivitas pariwisata, serta pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya. Kerangka konseptual penelitian menempatkan CBT sebagai landasan untuk menganalisis keterlibatan dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan destinasi, sedangkan SES digunakan untuk memahami hubungan kapasitas tersebut dengan kelembagaan, aktivitas pariwisata, dan sumber daya lokal. Kedua perspektif ini digunakan secara terpadu untuk membaca kondisi pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Taro, mengidentifikasi aspek yang telah berjalan, serta menemukan ruang penguatan yang didukung oleh data observasi dan wawancara. Melalui pendekatan ini, penguatan kapasitas masyarakat dipahami bukan hanya sebagai peningkatan kemampuan individu, tetapi juga sebagai proses yang berkaitan dengan kerja sama, tata kelola kelembagaan, dan keberlanjutan sumber daya yang menopang kegiatan pariwisata.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di Desa Wisata Taro, Kabupaten Gianyar, Bali. Penelitian dilaksanakan pada September 2026 dengan melibatkan empat informan, yaitu satu pengurus Pokdarwis, satu perwakilan pemerintah desa, satu pengelola daya tarik wisata, dan satu pelaku usaha pariwisata. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai keterlibatan masyarakat, pengelolaan kelembagaan, serta tantangan pengembangan pariwisata. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi daya tarik wisata, pemeliharaan fasilitas, dan pemanfaatan sumber daya lokal, sedangkan dokumentasi dan kajian literatur digunakan sebagai data pendukung. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui pengorganisasian data, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis menggunakan model *Community-Based Tourism* (CBT) dari Okazaki (2008) untuk mengkaji partisipasi masyarakat, kolaborasi, dan modal sosial, serta kerangka *Social-Ecological Systems* (SES) dari Ostrom (2009) untuk memahami keterkaitan antara aktor, kelembagaan, aktivitas pariwisata, dan sumber daya lokal. Kredibilitas data dijaga melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan sumber dokumenter yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat dan Distribusi Manfaat Ekonomi

Pengembangan Desa Wisata Taro memperlihatkan proses keterlibatan masyarakat yang berkembang melalui pembentukan kelembagaan, pengenalan potensi lokal, dan pengembangan kegiatan ekonomi pariwisata. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengembangan desa wisata mulai diorganisasikan pada 2017. Tahap berikutnya mencakup pengembangan beberapa potensi wisata, yaitu Lembu Putih di Taro Kaja, Semara Ratih di Taro Kelod, serta Bali Wana di wilayah Pakuseba. Potensi tersebut kemudian dikembangkan menjadi bagian dari produk wisata desa, antara lain melalui kegiatan tur, bersepeda, dan aktivitas luar ruang. Pada 2019, Ketua Pokdarwis juga merintis usaha *homestay* yang kemudian menjadi contoh bagi warga lain untuk mengembangkan usaha serupa. Informan memperkirakan bahwa Desa Taro memiliki sekitar 100 kamar *homestay*, meskipun angka tersebut masih memerlukan verifikasi melalui data akomodasi desa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya berlangsung melalui keikutsertaan dalam kegiatan wisata, tetapi juga melalui proses pembelajaran dari praktik usaha yang telah berjalan. Inisiatif *homestay* memberikan contoh konkret mengenai peluang ekonomi yang dapat dikembangkan masyarakat. Proses ini dapat dipahami sebagai pembelajaran berbasis praktik *learning by doing*, ketika pengalaman pelaku lokal membantu warga lain memahami bentuk usaha, persiapan, dan kebutuhan pengelolaan pariwisata. Dalam perspektif *Community-Based Tourism* (CBT), proses tersebut memperlihatkan salah satu jalur pembentukan kapasitas masyarakat, yaitu melalui pengalaman, pertukaran pengetahuan, dan pengembangan inisiatif ekonomi lokal namun, berkembangnya usaha masyarakat belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa partisipasi telah berlangsung secara substantif. Partisipasi perlu dibedakan antara keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, kesempatan menyampaikan pendapat, dan kewenangan memengaruhi keputusan. Ketua Pokdarwis menjelaskan bahwa musyawarah dilakukan secara berkala dan melibatkan unsur masyarakat melalui perwakilan dusun, BUMDes

Sarwada Amertha juga disebut terlibat dalam perencanaan pengembangan pariwisata, sementara pemerintah desa menjalankan peran dalam regulasi dan dukungan fasilitas. Keterangan ini menunjukkan adanya ruang koordinasi yang dapat mendukung pengelolaan kolektif. Meskipun demikian, data yang tersedia belum cukup untuk memastikan apakah seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam menentukan prioritas, mengajukan usulan, atau mengawasi pelaksanaan program. Temuan ini sejalan dengan Rosalina et al. (2023), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dan desa adat dalam pengelolaan sumber daya pariwisata di Bali. Namun, kasus Taro juga menunjukkan perlunya melihat lebih jauh bagaimana peluang usaha tersebut diterjemahkan menjadi kapasitas masyarakat untuk mengelola pariwisata secara berkelanjutan.

Aspek distribusi manfaat memberikan gambaran lain mengenai partisipasi masyarakat. Menurut keterangan Ketua Pokdarwis, sekitar 10% pendapatan *homestay* dialokasikan kepada desa wisata. Informan juga menjelaskan bahwa kegiatan pariwisata memberikan peluang ekonomi bagi toko dan usaha lokal karena wisatawan yang menginap melakukan transaksi di sekitar desa. Selain itu, informan menyebutkan pendapatan kawasan Taro Kaja sekitar Rp200 juta per bulan dan menjelaskan bahwa kegiatan pariwisata turut mendukung pembiayaan kegiatan sosial masyarakat. Ekonomi pariwisata di Taro dapat ditelusuri melalui beberapa saluran, yaitu pendapatan usaha, transaksi dengan usaha lokal, serta kontribusi bagi kegiatan masyarakat. Akan tetapi, keberadaan saluran manfaat tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa manfaat telah terdistribusi secara merata. Sejalan dengan model CBT yang dikembangkan Okazaki (2008), kualitas pengelolaan berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan warga, tetapi juga oleh hubungan antara partisipasi, kolaborasi, modal sosial, dan kemampuan masyarakat memengaruhi proses pengelolaan. Temuan ini menempatkan penguatan partisipasi substantif sebagai salah satu kebutuhan analitis dalam pengelolaan CBT di Taro. Keberadaan musyawarah dan berkembangnya usaha lokal merupakan fondasi penting, tetapi evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui bagaimana keputusan dibuat, bagaimana kontribusi ekonomi dialokasikan, dan sejauh mana kelompok masyarakat yang berbeda dapat terlibat. Dengan demikian, penguatan CBT tidak cukup diarahkan pada peningkatan jumlah usaha wisata, tetapi juga pada transparansi pengelolaan dan ruang partisipasi yang bermakna.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Regenerasi Masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi perhatian dalam pengembangan daya tarik wisata di Desa Taro. Pengelola Semara Ratih menyampaikan bahwa kelompok pengelolanya berjumlah 29 orang, tetapi kesiapan SDM untuk mengembangkan kegiatan dan paket wisata masih belum optimal. Informan juga menjelaskan bahwa sebagian pemuda memilih bekerja di luar desa atau luar negeri. Menurut pengelola, kondisi tersebut berkaitan dengan peluang pendapatan yang dinilai lebih menarik di luar desa. Selain itu, aktivitas Semara Ratih mengalami penurunan setelah sebagian warga yang sempat terlibat pada masa transisi pandemi kembali ke pekerjaan sebelumnya ketika kondisi pekerjaan mulai normal pada akhir 2023.

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas SDM tidak dapat dinilai hanya dari jumlah anggota kelompok atau keberadaan organisasi pengelola. Kapasitas operasional juga

berkaitan dengan kesinambungan keterlibatan tenaga kerja, kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan daya tarik wisata, serta kemampuan pengelola mempertahankan kegiatan secara rutin. Dalam kasus Semara Ratih, tantangan yang disampaikan informan bukan semata-mata kebutuhan menambah jumlah tenaga, melainkan juga kesiapan untuk mengembangkan produk wisata yang sesuai dengan karakter daya tarik tersebut, termasuk rencana pengembangan paket wisata spiritual. Pilihan sebagian pemuda untuk bekerja di luar desa perlu dibaca secara hati-hati. Keterangan mengenai pendapatan yang lebih tinggi berasal dari pengelola Semara Ratih; penelitian ini belum memperoleh penjelasan langsung dari pemuda yang memilih bekerja di luar desa mengenai pertimbangan mereka. Oleh karena itu, faktor pendapatan dapat dicatat sebagai penjelasan informan, tetapi belum dapat dipastikan sebagai penyebab utama mobilitas pemuda. Penelitian ini juga tidak dapat menyimpulkan bahwa generasi muda secara keseluruhan tidak tertarik pada pengembangan desa wisata.

Hal tersebut terlihat dari keterangan Ketua Pokdarwis yang menyebutkan bahwa sebagian pemuda yang sebelumnya bekerja di luar negeri kemudian kembali dan membangun usaha, seperti toko dan usaha pendukung pariwisata. Kedua keterangan tersebut tidak harus dipandang sebagai temuan yang saling bertentangan. Keduanya dapat menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda mengambil bentuk yang berbeda. Mendirikan usaha sendiri tidak sama dengan menjadi tenaga operasional pada suatu daya tarik wisata, karena keduanya dapat memiliki kebutuhan keterampilan, pola kerja, tingkat tanggung jawab, dan peluang pendapatan yang berbeda. Perbedaan ini memperluas pemahaman mengenai kapasitas masyarakat dalam CBT karena kapasitas tidak hanya berkaitan dengan keterampilan individu, tetapi juga dengan kesempatan untuk menerapkan keterampilan, keberlanjutan pekerjaan, dan dukungan kelembagaan. Penguatan kapasitas perlu menghubungkan pelatihan dengan kebutuhan nyata pengelolaan destinasi. Kompetensi pemanduan, komunikasi dengan wisatawan, pelayanan, promosi digital, dan pengelolaan usaha dapat menjadi bidang yang relevan, tetapi efektivitasnya perlu dinilai melalui penerapan keterampilan dan kesinambungan keterlibatan peserta. Selain itu, mekanisme regenerasi perlu mempertimbangkan kemungkinan kontribusi pemuda dalam berbagai bentuk, termasuk pengembangan usaha, pemasaran, penyusunan narasi wisata, dan pengelolaan operasional. Dengan demikian, temuan di Taro menunjukkan adanya perbedaan antara keberadaan potensi SDM dan kesiapan untuk mendukung pengelolaan daya tarik secara berkelanjutan. Tantangannya bukan sekadar mendorong pemuda agar kembali ke desa, melainkan memahami bentuk keterlibatan yang mereka pilih serta menciptakan ruang agar keterampilan, pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan pengembangan kapasitas yang mempertimbangkan kebutuhan dan pilihan masyarakat. Hafezi et al. (2023) menekankan pentingnya integrasi dimensi sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat

3. Kelembagaan dan Kolaborasi

Pengelolaan Desa Wisata Taro melibatkan sejumlah aktor, termasuk Pokdarwis, pemerintah desa, BUMDes Sarwada Amertha, pengelola daya tarik wisata, pelaku usaha, dan masyarakat. Berdasarkan keterangan Ketua Pokdarwis, Pokdarwis berperan mengoordinasikan pengembangan desa wisata dan mendorong pengembangan produk berdasarkan potensi lokal. Pemerintah desa

mendukung melalui regulasi dan fasilitas, sedangkan BUMDes terlibat dalam pengelolaan kegiatan usaha desa. Pengelola Semara Ratih juga menyampaikan bahwa mereka memiliki kesempatan menyampaikan usulan dalam pembahasan pengembangan pariwisata. Keterangan tersebut menunjukkan adanya struktur kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang menjadi dasar pengelolaan bersama. Dalam perspektif CBT, keberadaan berbagai lembaga dapat membuka ruang kolaborasi, tetapi efektivitasnya perlu dinilai dari cara kerja sama dilaksanakan dan bagaimana keputusan diterjemahkan menjadi tindakan. Keberadaan organisasi dan pertemuan rutin merupakan indikasi adanya mekanisme koordinasi, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa semua pihak memiliki pengaruh yang setara atau bahwa setiap keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

Temuan mengenai Semara Ratih memperlihatkan perbedaan antara kesempatan berpartisipasi dalam perencanaan dan kesiapan menjalankan kegiatan. Walaupun pengelola menyatakan dilibatkan dalam musyawarah, keterbatasan SDM masih menjadi tantangan dalam pengembangan paket wisata. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan dan kapasitas operasional merupakan dua aspek yang saling berhubungan, tetapi tidak identik. Ruang komunikasi dapat membantu menyampaikan kebutuhan dan menyusun rencana, sementara pelaksanaannya tetap memerlukan keterampilan, sumber daya, pembagian tanggung jawab, serta kesinambungan tenaga kerja. Data yang tersedia belum menjelaskan secara terperinci bagaimana prioritas program ditetapkan, bagaimana usulan dari berbagai kelompok dipertimbangkan, atau bagaimana pelaksanaan dan kinerja pengelola dievaluasi. Karena itu, efektivitas kolaborasi belum dapat disimpulkan hanya dari keberadaan musyawarah dan struktur kelembagaan. Penelitian lanjutan perlu menelusuri proses pengambilan keputusan secara lebih konkret, termasuk siapa yang menetapkan prioritas, bagaimana tanggung jawab dibagikan, dan bagaimana tindak lanjut keputusan dipantau. Wawancara juga mengungkapkan adanya potensi ketegangan antara kegiatan pariwisata dan aktivitas ekonomi lokal nonpariwisata. Ketua Pokdarwis menjelaskan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Taro tidak hanya bertumpu pada pariwisata, tetapi juga mencakup pertanian, peternakan, dan kerajinan. Aktivitas peternakan, seperti suara dan bau, dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi akomodasi yang berada di dekatnya. Menurut informan, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah menjelaskan karakter lingkungan setempat kepada wisatawan atau mengemas kehidupan pertanian dan peternakan sebagai bagian dari pengalaman *farm stay* dan agrowisata. Keterangan tersebut menunjukkan kemungkinan pendekatan adaptif dalam mengelola perbedaan antara aktivitas pariwisata dan kegiatan ekonomi masyarakat. Alih-alih menganggap seluruh aktivitas nonpariwisata sebagai gangguan, kehidupan lokal dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari karakter destinasi. Namun, informasi yang tersedia belum menunjukkan seberapa sering ketegangan tersebut terjadi atau seberapa efektif pendekatan yang disebutkan dalam mengatasinya. Sementara itu, perspektif SES membantu menempatkan aktivitas pariwisata, pertanian, peternakan, kelembagaan, dan lingkungan dalam satu sistem yang saling berinteraksi. Dengan demikian, tantangan kelembagaan di Taro bukan hanya mempertahankan koordinasi formal, tetapi juga memastikan bahwa keputusan dan praktik pengelolaan dapat mengakomodasi beragam aktivitas masyarakat serta kebutuhan operasional destinasi.

4. Pengelolaan Lembu Putih dalam Perspektif *Social-Ecological Systems*

Lembu Putih merupakan salah satu daya tarik penting di Desa Wisata Taro karena berkaitan dengan identitas dan tradisi lokal. Dalam perspektif *Social-Ecological Systems* (SES), keberadaan Lembu Putih dapat dipahami sebagai bagian dari sistem yang menghubungkan satwa, lingkungan, praktik budaya, kelembagaan pengelola, dan aktivitas wisata, pengelolaannya tidak cukup dilihat dari keberadaan satwa sebagai daya tarik, tetapi juga perlu mempertimbangkan bagaimana sumber daya tersebut dipelihara dan bagaimana aktivitas wisata berinteraksi dengan kebutuhan perlindungannya. Hasil observasi mencatat sejumlah kondisi di kawasan Lembu Putih yang membutuhkan perhatian, antara lain kabel yang tidak digunakan di area rumput, serta beberapa lembu yang terlihat memiliki luka luar.



Gambar 1. Kondisi Lembu Putih di Desa Wisata Taro.

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2026

Meskipun demikian, temuan observasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi aspek pengelolaan yang perlu diperiksa lebih lanjut. Kabel yang tidak digunakan memunculkan kebutuhan untuk menilai keamanan ruang bagi pengunjung dan satwa. Bangunan yang tidak difungsikan menimbulkan pertanyaan mengenai pemanfaatan ruang, pemeliharaan aset, dan kesesuaiannya dengan karakter kawasan. Sementara itu, luka luar yang terlihat pada beberapa lembu perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan pihak yang kompeten agar kondisi satwa dan kebutuhan penanganannya dapat dinilai secara tepat.

Dari perspektif SES, kondisi sumber daya dan fasilitas tersebut perlu dibaca bersama dengan pengorganisasian pengelolaan. Kerangka Ostrom (2009) menekankan pentingnya memahami hubungan antara aktor, aturan, interaksi, dan sumber daya dalam suatu sistem sosial-ekologis. Dalam konteks Lembu Putih, pendekatan tersebut mengarahkan perhatian pada pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fasilitas, bagaimana kondisi satwa dipantau, bagaimana potensi bahaya ditangani, dan apakah terdapat prosedur operasional yang menjadi acuan pengelola. Temuan ini juga menegaskan pentingnya membedakan keberadaan nilai konservasi dengan praktik pemeliharaan sehari-hari. Identitas budaya dan konservasi dapat menjadi dasar pengembangan daya tarik wisata, tetapi keberlanjutan pengelolaan juga memerlukan tindakan operasional yang dapat diperiksa. Dalam hal ini, pemeriksaan kondisi satwa oleh pihak kompeten, pengamanan kabel yang tidak digunakan, serta pemeliharaan jalan dan fasilitas merupakan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil observasi. Budaya Taro juga memungkinkan pengelolaan Lembu Putih dibaca melalui nilai Tri Hita Karana, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan *parhyangan*, hubungan antarmanusia *pawongan*, dan hubungan manusia

dengan lingkungan *palemahan*. Dimensi *parhyangan* relevan dalam mempertimbangkan penghormatan terhadap kesakralan dan norma lokal; *pawongan* berkaitan dengan keterlibatan masyarakat serta hubungan antarpelaku; sedangkan *palemahan* berhubungan dengan pemeliharaan lingkungan dan perhatian terhadap kondisi satwa.

Temuan yang ditemukan adanya aspek pemeliharaan fasilitas dan kondisi satwa yang perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memahami bagaimana nilai pelestarian diterjemahkan dalam praktik sehari-hari. Selain itu, penyediaan informasi mengenai sejarah dan makna budaya Lembu Putih dapat dipertimbangkan untuk memperkuat fungsi edukasi daya tarik tersebut. Penyusunan informasi sebaiknya melibatkan masyarakat dan pihak yang memahami tradisi setempat agar narasi yang disampaikan akurat serta menghormati makna budaya lokal. Dengan demikian, pengelolaan Lembu Putih memperlihatkan relevansi integrasi CBT dan SES. CBT membantu menganalisis keterlibatan masyarakat serta pembagian peran pengelolaan, sedangkan SES membantu menghubungkan tata kelola tersebut dengan kondisi sumber daya dan lingkungan. Keduanya mengarahkan evaluasi agar tidak hanya menilai keberadaan daya tarik atau kegiatan wisata, tetapi juga memperhatikan pemeliharaan sumber daya yang menjadi dasar keberlanjutan destinasi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan CBT di Desa Wisata Taro memiliki fondasi berupa kelembagaan lokal, mekanisme musyawarah, pengembangan usaha, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Inisiatif homestay yang diikuti warga lain, keterlibatan Pokdarwis dan BUMDes, serta keberadaan usaha pendukung pariwisata menunjukkan adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi lokal. Namun, temuan mengenai kesiapan SDM di Semara Ratih dan kondisi fasilitas serta satwa yang diamati di kawasan Lembu Putih memperlihatkan bahwa perkembangan usaha dan keberadaan kelembagaan belum dengan sendirinya menjamin kesiapan operasional maupun konsistensi pemeliharaan sumber daya.

Integrasi CBT dan SES memberikan cara untuk membaca temuan tersebut secara saling berkaitan. CBT membantu menelaah bentuk partisipasi, kolaborasi, akses terhadap pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat. SES memperluas analisis dengan mempertimbangkan bagaimana aktor dan kelembagaan berinteraksi dengan aktivitas pariwisata, kondisi lingkungan, satwa, serta nilai budaya yang menopang daya tarik destinasi. Melalui kedua perspektif ini, kapasitas masyarakat tidak hanya dipahami sebagai keterampilan individu, tetapi juga sebagai kemampuan kolektif yang berkaitan dengan pembagian tanggung jawab, koordinasi kelembagaan, kesempatan ekonomi, dan pemeliharaan sumber daya. Temuan mengenai partisipasi memperlihatkan bahwa ruang musyawarah dan peluang usaha telah tersedia, tetapi kualitas partisipasi serta pemerataan manfaat masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Pada aspek SDM, program pelatihan menunjukkan adanya upaya pengembangan kompetensi, sedangkan pengalaman Semara Ratih mengindikasikan bahwa kesiapan tenaga dan keberlanjutan keterlibatan tetap menjadi perhatian. Pada aspek ekologis, observasi kawasan Lembu Putih menunjukkan beberapa kondisi yang memerlukan pemeriksaan dan tindak lanjut.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat tiga arah penguatan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, memperkuat partisipasi substantif melalui kejelasan mekanisme pengambilan keputusan, tindak lanjut usulan, dan transparansi kontribusi maupun manfaat ekonomi. Kedua, menghubungkan pengembangan kompetensi dengan kebutuhan operasional dan kesempatan

berkontribusi yang berkelanjutan, termasuk dengan memperhatikan bentuk keterlibatan pemuda yang beragam. Ketiga, memperkuat tata kelola sosial-ekologis melalui penegasan tanggung jawab pemeliharaan, pemeriksaan kondisi satwa dan fasilitas, serta penyampaian informasi budaya yang disusun bersama masyarakat, ketiga arah tersebut merupakan implikasi analitis dari temuan penelitian. Taro memiliki fondasi kelembagaan dan ekonomi bagi pengembangan CBT, sementara penguatan kapasitas masih perlu diarahkan pada kualitas partisipasi, kesiapan operasional, dan pemeliharaan sumber daya sosial-ekologis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Community-Based Tourism (CBT) di Desa Wisata Taro, Bali, telah memiliki fondasi berupa kelembagaan lokal, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan usaha, serta pemanfaatan potensi alam dan budaya. Inisiatif pengembangan homestay memperlihatkan bahwa pembelajaran melalui praktik dapat mendorong partisipasi ekonomi masyarakat. Namun, berkembangnya usaha dan tersedianya ruang musyawarah belum sepenuhnya menunjukkan pemerataan manfaat maupun keterlibatan masyarakat secara substantif dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, penguatan CBT perlu diarahkan tidak hanya pada pengembangan usaha, tetapi juga pada transparansi manfaat ekonomi dan peningkatan peran masyarakat dalam proses pengelolaan destinasi. Dari aspek kapasitas masyarakat, kesiapan sumber daya manusia dan keberlanjutan keterlibatan tenaga kerja masih menjadi tantangan, terutama dalam pengembangan kegiatan dan paket wisata di Semara Ratih. Keberadaan Pokdarwis, pemerintah desa, BUMDes, dan kelompok pengelola telah menyediakan fondasi koordinasi, tetapi efektivitas kolaborasi tetap bergantung pada kesiapan operasional, pembagian tanggung jawab, dan pelaksanaan keputusan. Sementara itu, hasil observasi di kawasan Lembu Putih menunjukkan adanya kondisi fasilitas dan satwa yang memerlukan pemeriksaan serta tindak lanjut. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan pariwisata perlu disertai perhatian terhadap pemeliharaan sumber daya yang mendukung keberlangsungan daya tarik wisata.

Integrasi CBT dan *Social-Ecological Systems* (SES) dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat tidak hanya berkaitan dengan keterampilan individu dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan kualitas partisipasi, kapasitas kelembagaan, serta hubungan antara aktivitas pariwisata dan pemeliharaan sumber daya lokal. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan Desa Wisata Taro perlu mencakup peningkatan partisipasi substantif, pengembangan SDM sesuai kebutuhan operasional, dan penguatan tata kelola sosial-ekologis yang melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat, khususnya pemuda dan warga yang tidak terlibat langsung dalam pariwisata, serta mengkaji distribusi manfaat ekonomi dan praktik pemeliharaan sumber daya secara lebih mendalam. Langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai penguatan kapasitas masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan CBT di Desa Wisata Taro.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, L., Kurniawan, F., Romadhon, A., Geoffrey, D., Dhewani, N., Sjafrie, M., Damar, A., & Kleinertz, S. (2021). Assessing social-ecological system carrying capacity for urban small island tourism : The case of Tidung Islands , Jakarta Capital Province , Indonesia. *Ocean and Coastal Management*, 212(August), 105844. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105844>
- Bagus, I., Surya, K., Ayu, I., & Suryaningsih, A. (2023). Communication Strategy of Bumdes Sarwada Amertha in the Management of Taro Tourism Village towards Independent Tourism Village. *International Journal of Green Tourism Research and Applications*, 5(2), 92–99. <https://doi.org/10.31940/ijogtra.v5i2.92-99>
- Bali, B. P. S. P. (2026). *Bali's Foreign Arrivals Jan–Dec 2025 Rise, with Australia Remaining the Largest Contributor Overall*. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. <https://bali.bps.go.id/id/news/2026/02/02/347/bali-s-foreign-arrivals-jan-dec-2025-rise--with-australia-remaining-the-largest-contributor-overall-.html>
- Hafezi, F., Bijani, M., Gholamrezai, S., Savari, M., & Panzer-krause, S. (2023). Science of the Total Environment Towards sustainable community-based ecotourism : A qualitative content analysis. *Science of the Total Environment*, 891(March), 164411. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164411>
- Hanita, M., Dt, F., & Aprian, M. (2024). Journal of Destination Marketing & Management Beyond attraction : Unveiling Bali ' s cultural community ' s role in bolstering tourism resilience amidst the COVID-19 pandemic. *Journal of Destination Marketing & Management*, 34(November), 100953. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2024.100953>
- Kalpikawati, I. A., Kalpikawati, I. A., Wayan, N., & Pinaria, C. (2023). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Mendukung Desa Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Taro , Bali) data Statistik Lingkungan Hidup Sustainable Waste Indonesia yang. *Jurnal Ilmiah Pariwisata, Institut Pariwisata Tri Sakti*, 28(1), 50–68.
- Putu Eka Wirawan, P. D. R. (2024). Enhancing Cultural Heritage Tourism Through a Spiritual Knowledge: The Implementation of Tri Hita Karana in Taro Village Gianyar Bali. *JURNAL KAJIAN BALI*, 14(01), 215–233.
- Rosalina, P. D., Wang, Y., Dupre, K., & Putra, I. N. D. (2025). Rural tourism in Bali : towards a conflict-based tourism resource typology and management. *Tourism Recreation Research*, 50(1), 91–105. <https://doi.org/10.1080/02508281.2023.2223076>
- Rosalina, P., Dupre, K., Wang, Y., Darma, I. N., & Jin, X. (2023). Rural tourism resource management strategies : A case study of two tourism villages in Bali. *Tourism Management Perspectives*, 49(March), 101194. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2023.101194>
- Okazaki, E. (2008). A Community-Based Tourism Model: Its Conception and Use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511–529. <https://doi.org/10.1080/09669580802159594>
- Ostrom E. A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*. 2009 Jul 24;325(5939):419–22. doi: 10.1126/science.1172133. PMID: 19628857.